

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD Provisno dan dengan Renja PD.

### B. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Buluspesantren mengacu pada beberapa landasan hokum yang terkait dan masih berlaku. Beberapa landasan hokum tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara PengendBuluspesantren dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64.);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

#### C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusutan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2016-2021 yaitu sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang membuat Indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buluspesantren yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Buluspesantren adalah :

1. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi hasil pembangunan 5 tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tentang dalam RPJMD.
2. Merumuskan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buluspesantren beserta target pencapaian selama kurun waktu 5 tahun.
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan beserta target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 tahun.

#### D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Tahun 2016-2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**  
 Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan rencana strategis, landasan hukum yang diacu, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULUSPESANTREN**  
 Bab ini menguraikan Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Buluspesantren, sumber daya yang dimiliki serta kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantren.
- Bab III ISSUE-ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**  
 Pada bab ini dituangkan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, identifikasi isu-isu strategis (Lingkungan eksternal), telaah visi dan misi Bupati, kemudian dilanjutkan dengan penentuan issue strategis.
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN**  
 Bab ini menguraikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Buluspesantren, serta perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
 Menguraikan rencana program dan berapa rencana kegiatan untuk mendukung indikator sasaran yang ada beserta kerangka pendanaan indikatifnya.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
 Menguraikan indikator Program yang difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD.
- BAB VII PENUTUP**  
 Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- LAMPIRAN**

## BAB II

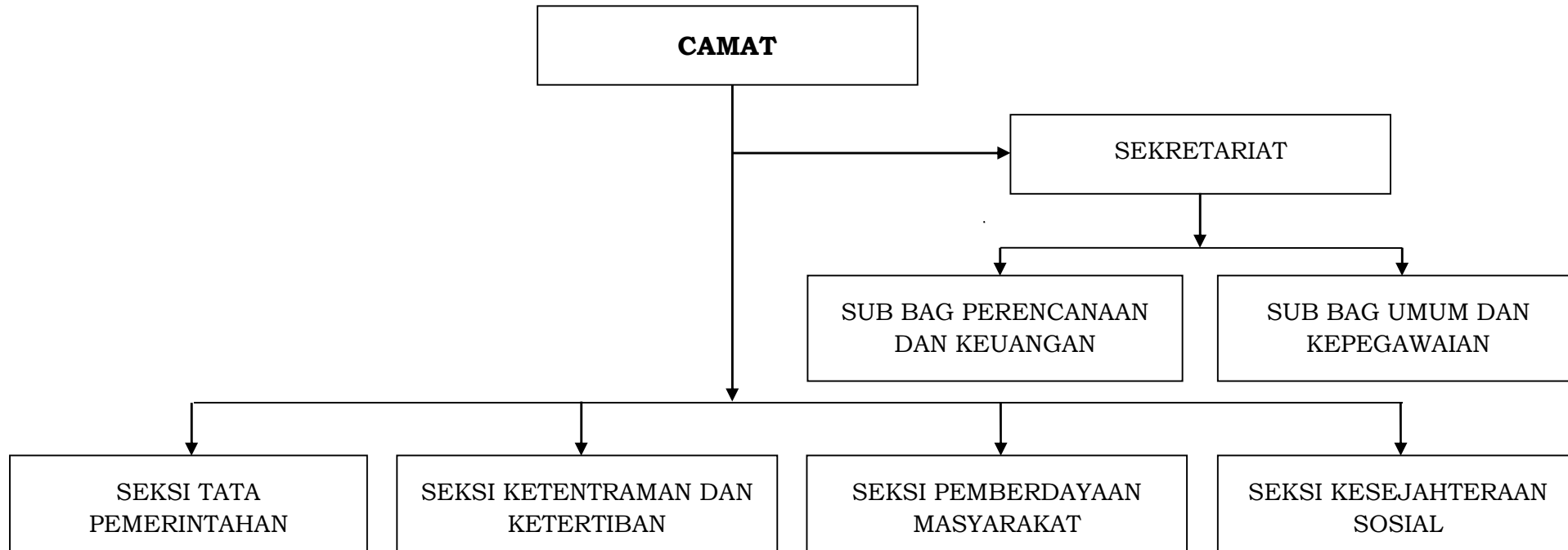
### GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

#### A. Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Buluspesantren

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Struktur Organisasi Kecamatan Buluspesantren tergambar pada bagan sebagaimana tertuang pada gambar 2.1. Adapun tugas pokok Kecamatan Buluspesantren sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 yaitu tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Buluspesantren mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. pelaksana kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
7. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
8. pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
9. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
10. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
11. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
12. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada di wilayahnya;
13. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
14. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan; dan
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Buluspesantren



Berdasarkan bagan pada gambar 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Kepala Camat Buluspesantren sampai pada tingkat Sekretariat Kecamatan Buluspesantren dan tingkat Seksi di Kecamatan Buluspesantren sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendBuluspesantren, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan tugas pokok tersebut sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. penyusunan rencana, pengendBuluspesantren dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayahkecamatan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

## 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

## 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/ Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- l. administrasi desa dan/atau kelurahan;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

## 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.



Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- e. pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggung jawabnya;
- f. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- g. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- h. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- k. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- m. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Yang Dimiliki

1. Sumber Daya Alam/Lingkungan

Kecamatan Buluspesantren berada pada jarak 15 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Kebumen. Selanjut ceritakan bagaimana situasi/lingkungan disekitar kantor yang berhubungan atau yang mempengaruhi kinerja dinas/kecamatan. Dapat pula disertakan gambar kantor dan lingkungan sekitar apabila ada yang penting untuk di kemukakan.

## 2. Sumber Daya Manusia

Secara Kuantitas, pegawai Kecamatan Buluspesantren berjumlah 21 orang yang terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang non Pegawai Negeri Sipil.

Secara kualitas, pegawai Kecamatan Buluspesantren sebagian besar berpendidikan S1 yaitu 5 orang (50%) (sedangkan yang lainnya berpendidikan SMA yaitu 13 orang (20,5%), S2 2 orang (20%), D3 0 orang (0%) dan ada juga yang berpendidikan SMP 1 orang (9,5%). Sedangkan untuk non pegawai negeri sipil direkrut dengan kedudukan sebagai tenaga harian lepas yang ditempatkan sesuai kemampuannya.

Pegawai yang menduduki jabatan eselon sebagian besar sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya. Tetapi ada juga yang belum mengikuti yaitu sebanyak 4 orang (20%). Secara lengkap kondisi Sumber Daya manusia yang ada Kecamatan Buluspesantren disajikan pada tabel 2.1.

Berdasarkan tabel 2.1, secara kuantitas pegawai Kecamatan Buluspesantren sudah mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik. Apabila setiap seksi ada 3 personil maka total kebutuhan pegawai negeri sipil mestinya berjumlah 26 orang. Berarti Kecamatan Buluspesantren masih kekurangan pegawai sejumlah 7 orang.

Guna mengatasi hal tersebut, maka Kecamatan Buluspesantren melakukan perekrutan tenaga harian lepas di mana pada tahun 2016 kondisinya berjumlah 1 orang. Dari sisi kualitas Pegawai pada Kecamatan Buluspesantren sangat minim sekali untuk itu sangat membutuhkan pegawai menguasai komputer karena kondisi sekarang semua pekerjaan di tuntutan menggunakan internet.

Tabel 2.1. Komposisi Sumber Daya Manusia  
Kecamatan Buluspesantren Tahun 2016

Eselon	BERDASAR GOL						BERDASAR PENDIDIKAN							DIKLAT YG DIKUTI		
	IV	III	II	I	Non PNS	Jml	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML	STRUK TURAL	FUNGSI ONAL	JML
ESELON III	2					2		2					2	2		2
ESELON IV		6				6	2	3		1			6	6		6
STAF		5	8		1	14				13	1		14	14		14
THL																
JUMLAH	2	11	8		1	22	2	5		14	1		22	22		22
% DARI JML PEG	5	65	18		5	100	5	25	5	60	5		100	100		100

3. Sarana/Prasana Yang dimiliki

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai. Kondisi sarana prasarana saat ini dirasakan masih kurang memadai untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Disamping itu juga banyak sarana prasarana yang perlu peremajaan dan tentunya perlu pemeliharaan setiap tahunnya.

Secara detail, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Buluspesantren berdasarkan data awal tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana  
Kecamatan Buluspesantren Tahun 2016

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
GEDUNG							
- PENDOPO	1			1			1
- GEDUNG KANTOR	1			1			1
- RUMAH DINAS	1			1			1
- MUSHOLA	1			1			1
- PARKIR KENDARAAN	1			1	1	1	1
KENDARAAN							
- MOBIL CAMAT		1		1	1	1	1
- RODA 2 UNTUK KANTOR		2	6	8	8	8	8
- RODA 2 UNTUK KADES	21			21	21		21
SARPRAS ELEKTRONIKA							
- ELECTRIC GENERATION SET	1			1	1		1
- LAPTOP	5	2	1	8	10	2	10
- PRINTER	4	2	2	8	10	2	10
- PC	4	2	2	8	8	2	10
- CAMERA ELEKTRONIC	1			1	1		1
- KOMPUTER	3	1	2	6	6	2	10
- TV WARNA LCD	3			3	3		3
- LCD	1			1	1		1
- AC	2			2	6	4	10
- MESIN KETIK MANUAL	1		1	2	1	1	1
- PESAWAT TELEPON			1	1	1	1	1

- KIPAS ANGIN	2		3	5	10	5	10
- SSB	1			1	1		1
- SOUNDSYSTEM	1			1	2	1	2
- MICROPHONE		2		2	5	3	5
SARPRAS KANTOR							
- KURSI TUNGGU	2	1	3	6	8	2	8
- KURSI TUNGGU STENLIST	1		1	4	7	3	7
- KURSI PELAYANAN	2	1		3	5	2	5
- MEJA PELAYANAN	1			1	3	2	3
- KURSI RAPAT LIPAT	63			63	100	37	100
- MEJA DAN KURSI TAMU		1 SET	1 SET	2 SET	3 SET	2 SET	3 SET
- KURSI ESELON III,IV	6		2	8	8	2	8
- MEJA KOMPUTER		3	3	6	6	3	6
- MEJA KERJA	8	5	4	17	21	4	8
- MEJA RAPAT PANJANG	4			4	8	4	8
- KURSI PLASTIK			20	20	70	50	70
- PAPAN PENGUMUMAN/INFORMASI	1			1	2	1	2
- LEMARI KAYU	2	1	4	7	10	3	10
- KURSI KAYU	10		2	12	15	3	15
- MEJA TULIS	1	2	1	4	6	2	6
- RAK KAYU	1		1	1	3	2	3
- FILLING BESI KABINET	1	4	3	8	10	2	3

Berdasarkan tabel 2.2 terlihat bahwa beberapa sarana prasarana penting dalam pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja lainnya perlu penambahan dan pemeliharaan. Kekurangan tersebut diupayakan penambahannya melalui kegiatan pembangunan secara bertahap setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun.

#### C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren

##### 1. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buluspesantren sebagaimana tertuang pada bab sebelumnya, gambaran pelayanan yang telah dilakukan dapat dicerminkan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada renstra periode 2010-2015.

Secara detail dan lengkap, data capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.





No.	Indikator Kinerja Utama	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian Tahun ke- (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	profil desa																		
19.	Tersusunnya dokumen data base / profil desa			105	21	21	0	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100	100
20.	Terbinanya anggota linmas di Kec.Buluspesantren																		
21.	Terbinanya anggota linmas di Kecamatan Buluspesantren(satuan)			157	42	42	42	42	0	42	42	42	42	0	100	100	100	100	100

Sumber : Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Buluspesantren, 201

## 2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap tahun Kecamatan Buluspesantren mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 98 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Buluspesantren

Indikator Kinerja Utama	Anggaran Pada Tahun Ke- (dlm ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (dlm ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	F	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Lancarnya kegiatan surat menyurat dan penyelesaian SPJ	1.170	1.170	1.280	1.480	2.480	1.170	1.170	1.280	1.480	2.480	100	100	100	100	100	100	100
Terbiayainya jasa komunikasi dan listrik	5.170	16.200	12.600	12.600	15.543	2.164	16.200	7.830	8.002	9.964	58,14	100	62,15	63,51	64,11	64	64
Terpeliharanya/terawatnya kend.dinas dan perpanjangan ijin kend.dinas	11.000	11.600	12.000	23.000	17.500	11.000	11.587	22.717	23.350	17.395	100	99,89	99,99	98,77	99,40	99	99
Termotivasinya kinerja pengelola keu. dlm penyelesaian adm.keu.	15.000	12.500	13.000	13.400	14.500	15.000	12.498	13.396	11.000	14.496	100	99,99	99,62	99,97	99,97	99	99
Terpeliharanya kebersihan gedung kantor/rumah dinas	1.100	1.100	1.400	2.500	4.000	1.100	1.100	1.199	1.400	4.000	100	100	99,97	100	100	100	100
Terpeliharanya kualitas peralatan kerja kantor	3.760	3.760	4.000	5.700	5.500	3.760	3.759	4.000	5.700	5.500	100	99,97	100	100	100	100	100
Tercukupinya kebutuhan ATK	4.000	4.000	4.500	6.500	5.500	4.000	4.000	4.500	6.500	5.500	100	100	100	100	100	100	100
Tercukupinya kebutuhan penggandaan dan penjilidan	2.180	2.180	2.400	2.400	3.000	2.180	2.180	2.400	2.400	3.000	100	100	100	100	100	100	100
Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor/rumah dinas	950	950	1.500	1.700	3.000	950	950	1.499	1.700	3.000	100	100	99,97	100	100	100	100
Tambahnya wawasan atau pengetahuan bagi karyawan	960	960	1.020	1.020	1.020	840	840	870	990	990	87,50	87,50	85,29	97,06	97,05	97	97
Tercukupinya makanan dan minuman untuk kelancaran rapat kantor	2.590	2.590	3.000	4.200	7.000	2.590	2.590	2.989	4.200	7.000	100	100	99,63	100	100	100	100
Lancarnya tugas-tugas koordinasi dengan instansi ke luar daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lancarnya tugas-tugas koordinasi dengan instansi dalam wilayah Kabupaten Kebumen	3.290	3.290	3.500	9.200	6.200	3.290	3.290	3.500	9.200	6.200	100	100	100	100	100	100	100
Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk kelancaran penyelesaian tugas-tugas kantor	25.700	28.742	19.478	37.478	33.778	25.689	28.742	19.478	37.478	33.778	99,96	100	100	100	100	100	100
Kualitas rumah dinas dalam keadaan baik	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000	1.500	2.000	21.340	2.000	100	100	28,57	533,5	40,00	40	40
Kualitas gedung kantor dan lingkungan kantor dalam keadaan baik	5.000	5.500	0	0	5000	5.000	5.497	0	0	5000	100	99,96	0	0	100	100	100

Indikator Kinerja Utama	Anggaran Pada Tahun Ke- (dlm ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (dlm ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	F	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Tersusunnya dokumen RKP Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	100	100	100
Terlaksananya fasilitasi Musrenbangcam	5.520	5.500	11.000	12.100	17.000	5.520	5.500	11.000	12.100	17.000	100	100	100	100	100	100	100
Terwujudnya rumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	100	100	100
Terinventarisir program masuk desa/IPMD	3.200	3.200	5.500	6.050	7.500	3.200	3.200	5.500	0	7.500	100	100	100	0	100	100	100
Terwujudnya database dan profil desa/kecamatan yang uptodate	2.880	2.800	4.800	6.800	4.800	2.880	2.800	4.800	6.050	4.800	100	100	100	100	100	100	100
Terusunnya RPJMDes	0	0	0	0	8.000	0	4.000	5.499	4.000	4.000	0	80,00	99,99	66,67	66,67	66	66
Terlaksananya fasilitasi penyusunan APBDesa di 16 desa	20.000	20.000	16.000	17.600	20.000	20.000	19.999	15.970	17.600	19.840	100	99,99	99,88	100	99,20	99	99
Terfasilitasinya upaya perlindungan perempuan dlm KDRT/PKK	0	3.500	3.500	3.200	3.200	0	3.500	3.500	0	3.000	0	100	100	0	100	100	100
Terwujudnya organisasi kepemudaan yang maju dan berkualitas	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	4.000	2.999	1.500	2.000	0	100	74,98	30,00	33,33	33	33
Terbinaya organisasi perempuan	0	0	0	3.787	5.000	0	0	1.998	3.787	5.000	0	0	0	100	100	100	100
Terlatihnya tenaga Linmas	3.000	4.000	4.000	4.500	7.500	3.000	4.000	3.990	4.500	7.500	100	100	99,75	100	100	100	100
Terbinaya masyarakat dlm pencegahan preventif kejahatan	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	100	100	100
Terlatihnya aparatur pemdes	0	0	0	17.600	0	0	0	0	17.600	0	0	0	0	100	0	0	0
Pelatihan Kearsipan	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terwujudnya Pilkades yang demokratis	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0

## BAB III

## ISSUE-ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sebelum menentukan issue strategis perlu diidentifikasi permasalahan yang dirasakan berdasarkan capaian indikator kinerja berdasarkan tupoksi, factor lain yang mungkin berpengaruh.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan SKPD  
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Buluspesantren

Kecamatan Buluspesantren dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan kepada masyarakat dicerminkan oleh indikator kinerja program yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah yaitu prosentase sebesar 95% yang didukung oleh indikator program seperti : Terpenuhinya sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif, tersusunnya dokumen IPMD tersusunnya dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Desa prosentase warga yang capaian kualitas sumber daya manusia, capaian sarana prasarana yang memadai, capaian partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara lengkap identifikasi permasalahan berdasarkan hal tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Buluspesantren

Aspek Kajian	Capaian/Kon disidi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Gambaran Pelayanan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Indik. program)					
1. Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	100%	IKK Renstra (100%)	-	Alokasi APBD kabupaten	-

2. Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	70%	IKK Renstra (83%)	SDM pengguna	Alokasi APBD kabupaten	Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dalam pemakaian dan perawatan sarpras
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembang kec.	10 dokumen	IKK Renstra (20 dok)	SDM Penyusun	Regulasi sering berganti; Bintek Perenc.	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen
3. Tersedianya database kecamatan	5 dokumen	IKK Renstra (14 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Sulitnya pencarian data
4. Tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	5 dokumen	IKK Renstra (10 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data; Partisipasi Masyarakat terkait	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Kurangnya partisipasi masyarakat.
5. Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan	5 dokumen	IKK Renstra (10 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data; Partisipasi Masyarakat terkait	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Kurangnya partisipasi masyarakat.
7. Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	50%	IKK Renstra (100%)	- Kapasitas SDM dalam pendampingan desa	Fasilitasi dari kabupaten, alokasi anggaran APBD Kab	Kurangnya kapasitas SDM Kecamatan dalam pendampingan desa
8. Prosentase warga yang berperan dalam politik	100%	IKK Renstra (100%)	SDM pendamping dan pengawas dari kec	Sosialisasi dari kab; alokasi anggaran APBD	Masih kurangnya Sosialisasi Pilkades yang lebih menarik;
9. Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	100%	IKK Renstra (100%)	SDM Pengelola;	SOP yang jelas; Ketersediaan Sarpras; Alokasi anggaran APBD kab	Belum adanya Penayangan SOP secara transparan kpd masyarakat; Belum memadainya Sarpras

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Penyebaran paham Radikalisme	Lunturnya rasa Nasionalisme	Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota linmas, pembinaan karangtaruna dan organisasi kepemudaan	
2	Isu kewarganegaraan ganda  Mulai Dicanangkannya MEA	Isu 20 juta penduduk belum ber KTP.  Belum bisa bersaing dengan Ekonomi Lokal	Belum optimalnya pelayanan Pembuatan KTP Elektronik  Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat, pelatihan aparat	

#### B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanan kepada masyarakat. Faktor tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kecamatan mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Adapun misinya ada 6 dimana Kecamatan Buluspesantren dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 6 yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Kecamatan Buluspesantren dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong



Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi,  
Misi dan Program Kepala Daerah

Visi: bersama menuju masyarakat kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis dan berkelanjutan				
No.	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1.	Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.			
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnya kualitas sumber daya manusia		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih Kurangnya Sarana/Prasarana aparaturnya yang memadai		
c.	Program Pengembangan Data/Informasi	Belum semua sumber daya manusia berperan aktif dalam proses penyusunan dok perencanaan dan evaluasi pembangunan		
d.	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Belum terdokumennya database secara kontinue dan up to date		
e.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Belum tersedianya data penduduk miskin yang up to date	Belum tercukupinya anggaran yang tersedia	Adanya SDM yang melakukan pendataan
f.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan kurangnya pembinaan pada Karang taruna	Kurangnya pembinaan pada Karangtaruna	Adanya pemuda sudah punya wadah Karang taruna
g.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kurangnya sosialisasi kemasyarakatan	Kurang tersedianya anggaran	Adanya lembaga-lembaga desa
h.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada.	Tersedianya sumber daya manusia

i.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Belum optimalnya peran PKK dalam pembangunan.	Kurangnya anggaran yang tersedia	Adanya wadah perkumpulan perempuan
j.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendali Buluspesantren pelaksanaan kebijakan KDH	Belum optimalnya sosialisasi masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KTP, KK dan akte kelahiran	Tersedianya anggaran yang mencukupi
k.	Program perencanaan pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat perencanaan pembangunan	Tersedianya anggaran yang mencukupi.

Berdasarkan tabel 3.3, dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pencapaian misi antara lain :

1. Belum tercukupinya anggaran yang tersedia  
Pada Kecamatan Buluspesantren sebagian besar anggaran yang tersedia pada setiap kegiatan belum tercukupi.
2. Kurangnya pembinaan pada karangtaruna.  
Masalah tersebut disebabkan dana pembinaan yang ada tidak mencukupi.
3. Kurangnya pembinaan anggota Linmas, disebabkan dana pembinaan yang ada tidak mencukupi.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada, ini merupakan salah satu penghambat pembangunan di Kecamatan Buluspesantren, karena masyarakat tidak banyak terlibat didalamnya.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian misi antara lain adalah :

1. Tersedianya dana dari Pemerintah Daerah, meskipun dana tersebut sebagian besar untuk melaksanakan kegiatan belum dapat mencukupinya.
2. Adanya sumber daya manusia yang melakukan pendataan, dengan adanya sumber daya manusia dalam melakukan pendataan penduduk miskin merupakan faktor pendorong tersusunnya data penduduk miskin di Kecamatan Buluspesantren.
3. Adanya wadah pemuda, adanya anggota Linmas pada setiap Desa, adanya lembaga-lembaga desa, adanya wadah perkumpulan perempuan, merupakan salah satu pendukung keberhasilan pembangunan di Kecamatan Buluspesantren.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendorong dalam permasalahan pelayanan Kecamatan Buluspesantren tersebut dapat ditentukan beberapa isu strategis antara lain :

1. Penambahan Sarana/Prasarana aparatur yang memadai
2. Optimalisasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan seluruh SDM yang terkait

3. Penyusunan database Kecamatan Buluspesantren secara kontinue dan uptodate
4. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan APBD lebih optimal
5. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pencermatan dan pengendBuluspesantren dalam penyusunan RKA/DPA.

## BAB IV

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

## A. Visi

Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

## B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Kecamatan Buluspesantren dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi ke 1, 4 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

## C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Kecamatan Buluspesantren.

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2016-2021 pada Kecamatan Buluspesantren dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. TARGET INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi awal perencanaan (Akhir 2015)	Target Kinerja						Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2021)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian pelayanan Kecamatan	%	90	93	94	95	96	97	98	97	
		Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	6
		Terfasilitasinya kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, kemandirian, kesadaran lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	kelompok	21	21	21	21	25	28	30	36	36
			Menurunnya Jumlah kasus kriminalitas	kasus	100	90	80	70	60	50	50	50	50
			Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	orang	50	50	50-	50-	50	50-	-	-	157
			Prosentase warga yang berperan dalam politik	%	75	77			80				80

### C. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan petugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan			
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 1.	Pembinaan kepemudaan dan sosial masyarakat	Peningkatan Peran Serta kepemudaan



	1. Sasaran 2.1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Upaya Fasilitasi TKP2Kdes	Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Mengupayakan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan sarpras penunjang kapasitas kelembagaan aparatur
		Fasilitasi kepada masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan wilayah
		Fasilitasi pelayanan KTP dan Perijinan	Meningkatkan Sistem Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Kecamatan Buluspesantren berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Buluspesantren adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana;
3. Program pengembangan data/ statistik;
4. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah;
5. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
8. Program pengembangan wawasan kebangsaan;

9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
10. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
11. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
12. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan;
13. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendBuluspesantren pelaksanaan kebijakan KDH;
14. Program perencanaan pembangunan daerah.

#### B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Buluspesantren adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
4. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan kompenen instalansi listrk/ penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
11. Penyediaan makan dan minum;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
13. Pengadaan peralatan gedung kantor;
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
15. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
16. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas;
17. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur;
18. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
19. Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan
20. Fasilitasi TKP2KDes/ Kel;
21. Pembinaan sosial masyarakat;
22. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
23. Fasilitasi APBDes;
24. Fasilitasi program pembangunan;
25. Pembinaan PKK;
26. Fasilitasi pemilihan kepala desa;
27. Fasilitas pengisian perangkat desa;
28. Fasilitas program pembangunan pedesaan

29. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN );
30. Penyelenggaraan Musrenbangcam.
31. Inventarisasi Pembangunan Masuk Desa (IPMD)

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan misi tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 5.1

Tabel.5.1  
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Beserta Pendaannya Tahun 2016 – 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) (Sertakan Satuan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Akhir 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pd akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada program & sasaran)	Lokasi (Diisi apabila lokasi program /keg sampai dengan desa/kecamatan)	
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan public yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, system kelembagaan dan tata ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama,	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif	Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah / (indeks tata kelola yang baik)	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan masyarakat desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	do ku me n	1	1	6.300	1	7.350	1	8.000	1	8.000	1	8.500	1	8.500	6		
					Fasilitasi TKP2Kdes	Rapat kordinasi TKP2KDes	kal i		12	6.300	12	7.350	12	8.000	12	8.000	12	8.500	12	8.500			
					Capaian Nilai Survey Masyarakat	Program peningkatan system pengawasan	Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	53.000	100	51.000	100	55.000	100	55.000	100	56.000	100	56.000	100	
						Fasilitasi PATEN	Terfasilitasinya kegiatan PATEN	bln		12 bln	53.000	12 bln	51.000	12 bln	55.000	12 bln	55.000	12 bln	56.000	12 bln	56.000		
				Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase des yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	%	50	60	19.800	70	20.900	80	25.500	90	29.000	100	33.500	100	40.000	100	
						Fasilitasi APBDes	Fasilitasi penyusunan APB Des	kal i		21	46.000	21	29.400	21	25.000	21	25.000	21	26.500	21	26.500		
						Fasilitasi program-program pembangunan yang masuk desa	Pembinaan dan fasilitasi desa tentang program-program pembangunan masuk desa	kal i		21	10.500	21	5.500	21	7.500	21	9.000	21	10.000	21	11.000		
				Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan,	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	kel om po k	16	20	4.000	24	7.500	28	10.000	32	13.000	36	15.000	40	16.500	36	bim

		keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik																					
				Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi yang terbina	Kelompok			0	12	4.000	12	4.000	12	5.500	12	6.000	12	6.500				
				Pembinaan social masyarakat	Jumlah organisasi social yang terbina	kelompok		2	4.000	2	5.000	2	5.000	2	5.500	2	6.000	2	6.500				
			Menurunnya jumlah kasus kriminalitas	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Menurunnya jumlah kasus kriminalitas	kasus	100	90	-	80	5.000	70	6.500	60	7.000	50	7.000	50	8.000	50			
				Pelatihan pengemudi Buluspesantren keamanan dan kenyamanan lingkungan	Petugas keamanan yang terlatih	orang				42	5.000	42	6.500	42	7.000	42	7.000	42	8.000				
			Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	orang	300	2	12.000	2	11.500	2	11.000	2	11.500	2	12.000	2	12.000	10			
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pelatihan paskibra tingkat kecamatan	kalori		2	12.000	2	11.500	2	11.000	2	11.500	2	12.000	2	12.000				
			Prosentase warga yang berperan dalam politik	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Prosentase warga yang berperan dalam politik	%	75	77	-	-	-	80	11.000		-		-		80				
				Fasilitas pemilihan kepala desa	Monitoring pilkades	kalori	21	3	3.000	3	3.000			18	28.500			3	4.500				
				Fasilitasi pengisian perangkat desa	Pembinaan perangkat desa	kalori	21		0	3	5.500		-	18	15.000		-	3	4.500	21			
				Program pengembangan data/ informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan	dokumen	10	2	4.500	2	6.000	2	6.000	2	6.500	2	7.000	2	7.500	20			
				Penyusunan & pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja kecamatan dan LAKIP Kecamatan	dokumen		2	4.500	2	6.000	2	6.000	2	6.500	2	7.000	2	7.500				

				Program pengembangan data/informasi/statistik	Tersedianya database kecamatan	do ku me n	10	2	9.000	2	9.000	2	9.500	2	9.500	2	10.000	2	10.000	14	
				Penyusunan database dan profil desa / kecamatan	Tersusunnya database kecamatan			2	9.000	2	9.000	2	9.500	2	9.500	2	10.000	2	10.000		
				Program perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	do ku me n	10	2	18.900	2	21.000	2	22.000	2	23.000	2	24.000	2	24.000	14	
					Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan	do ku me n	5	1		1		1		1		1		1		10	
				Penyelenggaraan Musrenbang cam	Fasilitasi musrenbangcam	ora ng		150	18.900	150	21.000	150	22.000	150	23.000	150	24.000	150	24.000		
				Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Inventarisasi ke desa-desa	kal i						21	3.000	21	3.500	21	3.500	21	4.000		
			Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	Program peningkatan perempuan di pedesaan	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	kel om po k	21	21	5.000	21	6.000	21	5.000	21	5.000	21	6.000	21	6.500	21	
				Pembinaan PKK	Jumlah PKK terbina			42	2.200	42	2.750	42	3.000	42	4.500	42	5.500	42	7.500		
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah	Prosentase capaian pelayanan Kecamatan		Prosentase capaian pelayanan Kecamatan	%	90	93		94		95		96		97		98		97	
				Program pelayanan Administrasi perkantoran	Terpenuhinya sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	%	100	20	93.270	20	104.651	20	121.300	20	140.000	20	159.700	20	177.750	100	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat dan dokumen	bln		12	1.000	12	1.100	12	1.250	12	1.500	12	1.750	12	1.750		





				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana prasaranan aparatur yang memadai	%	70	3		2		3		2		3		2		83		
					Terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang ada	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	unit						2 unit	40.000	2 unit	22.500	2 unit	23.000	2 unit	22.000			
				Pengadaan mebeler	Pengadaan kursi meja	unit				2	10.000	50	15.000	4	20.000	3	20.000	3	20.000			
				Pengadaan sarpras kantor	Pengadaan komputer	pa ket		2	18.000	2	15.000	2	17.500	1	20.000	1	15.000	1	20.000			
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor	pa ket		3	5.000	2	10.000	2	20.000	2	20.000	2	15.000	2	20.000			
				Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	bln				12	1000	12	1500	12	2000	12	2.000	12	2.500			
				Pemeliharaan rutin / berkala mebeler	Terpeliharanya mebeler	bln		12	2.000		3.000	12	3.000	12	3.500	12	3.500	12	3.500			
				Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	bln		12	3.000		1.000	12	2.000	12	2.000	12	2.500	12	3.000			
<b>JUMLAH</b>												<b>236.961</b>		<b>240.856</b>		<b>327.300</b>		<b>483.200</b>		<b>535.750</b>		

CAMAT BULUSPESANTREN

**Drs. BUDHI SUWANTO, M.Si**  
NIP.19740325 199302 1 002

BAB VI  
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD

Kecamatan Buluspesantren dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 6.1.

**Tabel.6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kon disi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-												
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		
						Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar Get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan	Prosentase capaian pelayanan kecamatan		Prosentase capaian pelayanan kecamatan	90	93		94		95		96		97		98		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran (prosentase)	100	20	93.270	20	104.615	20	121.300	20	140.000	20	159.700	20	177.750	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat (bulan)		12	1.000	12	1.250	12	1.500	12	1.750	12	2.000	12	2.250	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)		12	10.000	12	11.000	12	15.000	12	17.000	12	20.000	12	22.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)		12	25.000	12	26.500	12	27.000	12	29.000	12	30.000	12	32.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan (bulan)		12	15.000	12	17.500	12	20.000	12	22.500	12	25.000	12	27.500	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor (bulan)		12	1.500	12	3.000	12	4.000	12	6.000	12	8.000	12	10.000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)		12	3.000	12	3.000	12	4.000	12	5.500	12	6.500	12	7.500	
			Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor (bulan)		12	7.020	12	7.015	12	8.000	12	11.000	12	15.000	12	17.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bulan)		12	5.000	12	5.000	12	6.000	12	6.500	12	7.000	12	7.500	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)		12	1.250	12	1.150	12	1.500	12	1.750	12	2.000	12	2.500	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan (bulan)		12	1.500	12	1.200	12	1.800	12	2.000	12	2.200	12	2.500	
			Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat (bulan)		12	9.000	12	11.000	12	13.000	12	15.000	12	17.000	12	19.000	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)				12	3.000	12	4.000	12	5.000	12	6.000	12	7.000	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah (bulan)		12	14.000	12	14.000	12	15.500	12	17.000	12	19.000	12	21.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai (prosentase)		70	3		2		3		2		3		2	
				Terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang ada (prosentase)		100	100		100		100		100		100		100	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (paket)			2		2		2		2		2		2	
			Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Pengadaan kendaraan dinas operasional (unit)									2	40.000	2	50.000	2	60.000
			Pengadaan mebeleur	Pengadaan kursi meja (unit)			25	13.500	3	3.000	25	12.500	4	16.000	3	15.000	20	10.000
			Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan computer (paket)			1	20.500	1	16.000	1	25.000	1	27.000	1	30.000	1	32.000
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas (bulan)							12	4.000			12	7.000	12	7.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (bulan)							12	6.000			12	10.000	12	12.000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kantor	Terpeliharanya mebeleur kantor (bulan)			12	3.000			12	5.000	12	6.000	12	7.000	12	7.000			
Program pengembangan data/informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan (dokumen)		10	2	4.500	2	6.000	2	6.000	2	6.000	2	8.500	2	10.000			
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja Kec dan LAKIP Kec			2	4.500	2	6.000	2	6.000	2	6.000	2	8.500	2	10.000			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kon disi 2015	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar Get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Target	Rp (000)
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya database kecamatan	5 dok	1 dok	9.000	2 dok	9.000	2 dok	5.500	2 dok	7.500	2 dok	9.000	2	10.000
			Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	tersusunnya database kecamatan		1 dok	4.400	2 dok	4.950	2 dok	5.500	2 dok	7.500	2 dok	9.000	2	10.000
			Program perencanaan daerah	tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif (dokumen)	5	1		1		1		1		1		1	
				Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan (dokumen)	5	1	10.791	1	10.791	1	17.000	1	21.000	1	24.000	1	26.500
			Penyelenggaraan Musrenbangcam	Fasilitas musrenbangcam (orang)		66	10.791	66	10.791	66	12.000	66	13.500	66	15.000	66	17.000
			Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Inventarisasi ke desa-desa (kali)						11	5.000	11	7.500	11	9.000	11	9.500
		Capaian nilai surveykepuasan masyarakat	Program peningkatan system pengawasan	Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani (prosentase)	100	100	48.000	100	51.000	100	60.000	100	65.000	100	70.000	100	75.000
			Fasilitasi PATEN	Terfasilitasinya kegiatan PATEN (bulan)		12	48.000	12	51.000	12	60.000	12	65.000	12	70.000	12	75.000
	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP des	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentasedesa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	50	60	19.800	70	20.900	80	25.500	90	29.000	100	33.500	100	40.000
			Fasilitasi APBDes	Fasilitas penyusunan APBDes (kali)		11	14.300	11	15.400	11	18.000	11	20.000	11	22.500	11	22.500
			Fasilitasi program-program pembangunan yang masuk ke desa	Pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa (kali)		11	5.500	11	5.500	11	7.500	11	9.000	11	11.000	11	15.000
	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan masyarakat desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin (dokumen)	1	1	3.300	1	3.800	1	4.500	1	5.500	1	6.500	1	7.000
			Fasilitasi TKP2KDesa/Kel	Rapat kordinasiTKP2KDesa/Kel (kali)		12	3.300	12	3.850	12	4.500	12	5.500	12	6.500	12	7.000
	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan, lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan (kelompok)	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan (kelompok)	16	20	4.000	24	7.500	28	10.000	32	13.000	36	15.000	40	16.500
			Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi yang terbina (kelompok)				12	3.000	12	4.500	12	5.500	12	6.000	12	6.500
			Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah organisasi social yang terbina (kelompok)		2	4.000	2	4.500	2	5.500	2	7.500	2	9.000	2	10.000
		Menurunnya jumlah kriminalitas	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Menurunnya jumlah kasus kriminalitas (kasus)	100	90		80		70	7.500	60	10.000	50	12.500	50	15.000
			Pelatihan pengendBuluspesantren keamanan dan kenyamanan lingkungan	Petugas keamanan yang terlatih (orang)						33	7.500	33	10.000	33	12.500	33	15.000
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa (orang)	30	2	12.000	2	11.500	2	15.000	2	17.500	2	20.000	2	22.500
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pelatihan paskibraka tingkat kecamatan (kali)		2	12.000	2	11.500	2	15.000	2	17.500	2	20.000	2	22.500
		Prosentase warga yang berperan dalam politik	Program peningkatan keberdayaan masyarakat masyarakat pedesaan	Prosentase warga yang berperan dalam politik	75	77	-	-	-	-	80	11.000	-	-	-	-	
			Fasilitas pemilihan kepala desa	Monitoring pilkades							11	11.000					
		Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif (kelompok)	11	11	2.200	11	2.750	11	3.000	11	4.500	11	5.500	11	7.500
			Pembinaan PKK	Jumlah PKK terbina (kelompok)		11	2.200	11	2.750	11	3.000	11	4.500	11	5.500	11	7.500

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Buluspesantren selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

#### A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebumen, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

#### B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Buluspesantren berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Buluspesantren berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan

berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relative cepat, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini dapat membawa hasil yang positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2015-2019.

